

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika pergantian pemimpin merupakan salah satu amanat penting dari adanya sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya. Penerapan sistem demokrasi langsung di Indonesia merupakan salah satu jawaban pemerintah atas tuntutan reformasi yang mengharuskan adanya suatu sistem pemerintahan yang memberi peranan lebih besar kepada daerah dalam mengatur roda pemerintahannya sendiri. Kebijakan ini kemudian dikenal sebagai otonomi daerah di mana kekuasaan tidak lagi terpusat (sentralisasi) melainkan kekuasaan itu diberikan secara penuh kepada daerah atau yang dikenal dengan istilah desentralisasi.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga nilai demokrasi dapat dikatakan relatif mengakar dalam setiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia baik itu aspek sosial, budaya, dan politik. Murod(1999:59) mendefinisikan demokrasi sebagai sebagai suatu *policy* di mana semua warga menikmati kebebasan untuk berbicara, berserikat, mempunyai hak yang sama di depan hukum, dan kebebasan untuk menjalankan agama yang dipeluknya. Dalam demokrasi terdapat pengakuan terhadap kehendak rakyat yang dijadikan landasan legitimasi serta kewenangan pemerintah. Kehendak tersebut nantinya akan dituangkan dalam suatu iklim politik terbuka, yaitu dengan melaksanakan pemilihan umum yang dilaksanakan secara bebas dan berkala.

Widorsho (Politik dan Hukum, 2020) menjelaskan bahwa sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dinilai berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari hasil survei nasional kinerja satu tahun Jokowi-Ma'aruf Amin yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indo Barometer pada 10-17 Oktober 2020. Dari survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling dan margin of error sebesar kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan 56.4% publik merasa puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini. Sedangkan yang merasa tidak puas sebesar 37,3% dan yang tidak tahu dan tidak menjawab sebesar 6.3%. Melihat acuan data tersebut maka secara garis besar dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan. Pelaksanaan demokrasi ini mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yakni kehidupan budaya, bermasyarakat, beragama, dan yang paling utama yaitu kehidupan Politik.

Pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu amanat penting dari adanya penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang biasa disebut dengan pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan partai politik dan perseorangan. Pilkada juga merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan.

Menurut Fitriyah (2005:1), pentingnya pilkada secara langsung membuat semua daerah harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan berusaha bagaimana dapat berlangsung demokratis dan berkualitas sehingga benar-benar mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat membawa kemajuan bagi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat daerahnya. Bambang Purwoko (2005:10), menjelaskan bahwa dalam pilkada langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan publik dan juga berarti adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan.

Pilkada merupakan sebuah gambaran desentralisasi berdasarkan UU No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejatinya, Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan bertujuan sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin atau sebaliknya apabila rakyat tidak percaya maka memungkinkan terjadinya suatu rotasi kekuasaan di mana suatu pemerintahan akan berakhir dan diganti. Pelaksanaan pilkada di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan beberapa parameter demokrasi yakni: 1) Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur, 2) Memungkinkan terjadinya suatu rotasi kekuasaan, 3) Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka, dan 4) Akuntabilitas politik.

Perhelatan pilkada yang diselenggarakan selalu identik dengan kehadiran elit lokal yang memberi pengaruh kepada masyarakat setempat. Kaum elit merupakan sebuah istilah yang sangat familiar, tidak hanya dalam ranah politik tetapi juga dalam ranah sosial kehidupan bermasyarakat. Awal kemunculan elit di Indonesia adalah karena terjadinya pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisitis ke desentralistis. R. Siti Zuhro (2009:10-11), menjelaskan bahwa sejak sentralisitis bergulir telah terjadi kebangkitan politik lokal. Hal ini ditandai dengan berkembangnya jumlah aktor yang ikut berperan dalam menentukan kebijakan publik, baik di level pusat maupun daerah dengan praktiknya yang beragam. Perubahan sistem politik yang tidak lagi memusat juga berdampak pada munculnya politik oligarki dan otoritarianisme baru (Abdul Chaliki, 2016:10). Kondisi tersebut tercipta akibat dari munculnya *local strongmen* (elit lokal) yang selama Orde Baru aspirasi politiknya terkebiri. Elit lokal inilah yang melahirkan dinasti politik baru, pola korupsi baru dan penyalahgunaan wewenang.

Elit kerap kali digunakan sebagai penamaan terhadap orang-orang yang sukses dan mampu menduduki jabatan yang tinggi dalam strata sosial masyarakat. Menurut Robert Van Neil (1984:30), elit adalah orang yang mempunyai stratifikasi di atas rakyat jelata dan mempunyai kedudukan, memimpin, memberi pengaruh, menuntun, dan mengatur masyarakat. Suzzane Keller (1995:28) mendefinisikan elit sebagai individu atau kelompok yang mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik pada tingkat lokal.

Dalam suatu kelompok masyarakat, terdapat beberapa individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dan peranan yang kuat, oleh Keller mereka inilah yang disebut sebagai elit. Teori elit merupakan teori yang berasumsi bahwa yang menentukan dinamika politik suatu wilayah berada pada tangan elit politik. Elit politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu iklim politik, elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan serta kehormatan yang mampu mempengaruhi masyarakat dalam suatu tindakan pengambilan keputusan.

Kekuasaan merupakan salah satu unsur terbentuknya elit. Dapat dikatakan bahwa elit politik merupakan individu atau kelompok yang mempunyai kekuasaan politik. Peranan kaum elit dalam suatu kontestasi politik mencerminkan pengaruh mereka dalam merebut kekuasaan dengan mengontrol aspek-aspek kehidupan masyarakat semisal aspek sosial, budaya dan politik. Kehadiran elit dalam kehidupan

masyarakat menggambarkan suatu power (kekuasaan) untuk melakukan suatu tindakan. Secara umum menurut John Gaventa kekuasaan memiliki tiga dimensi (Halim, 2014) yaitu : 1) dimensi level, yang terdiri atas lokal, nasional, dan global, 2) dimensi space atau dimensi ruang, yang terdiri dari ruang tertutup (closed space), ruang yang diperkenankan (invited space), dan ruang yang diciptakan atau diklaim (claimed space), 3) dimensi forms atau dimensi bentuk, yang terdiri dari bentuk yang terlihat (visible), bentuk yang tersembunyi (hidden), dan bentuk yang tidak terlihat (invisible). Elit dan kekuasaan merupakan dua variable yang saling melengkapi di mana jika dalam suatu kelompok masyarakat terdapat kelompok elit maka di situ terdapat pula sumber-sumber kekuasaan dan begitu juga sebaliknya.

Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Manggarai memberikan ruang kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mengaktualkan setiap gagasan dan kepentingan politik demi kebaikan masyarakat setempat. Para tokoh masyarakat di Manggarai dikenal memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat dikarenakan para tokoh masyarakat tersebut mampu mengakomodasi berbagai macam gagasan untuk kepentingan masyarakat setempat. Para tokoh masyarakat inilah yang kemudian dikenal sebagai elit lokal masyarakat Manggarai.

Elit lokal di Manggarai memainkan peranan penting dalam kontestasi pilkada yang diselenggarakan. Elit lokal dikenal mampu memberi pengaruh kepada masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan politik. Para elit lokal ini menjelma sebagai aktor politik bertamengkan ikatan primordialisme kebudayaan Manggarai. Ikatan primordialisme yang dipakai oleh elit lokal sebagai sarana politik termuat dalam suatu unsur kebudayaan masyarakat Manggarai, yaitu kebudayaan Lonto Leok.

Elit lokal dalam kebudayaan masyarakat manggarai terdiri dari berbagai tingkatan yakni ; *Tua Golo* atau kepala suku maupun kepala adat, *Tua Teno* yakni tokoh yang memiliki andil untuk membagi tanah, *Tua Gendang* yakni tokoh yang memiliki tugas untuk menjaga rumah adat, *Tua Panga* yakni tokoh yang mewakili suatu ranting keluarga, *Tua Kilo* yakni kepala keluarga. Beberapa elit lokal seperti yang telah dijelaskan memiliki peranan penting dalam memainkan politik lokal di Manggarai.

Seringkali para elit lokal tersebut menjadikan budaya lonto leok sebagai sarana untuk menarik pemilih dalam suatu konteks pertemuan adat. Budaya lonto leok yang sejatinya sebagai pertemuan adat semata kini telah dimodernisasi sebagai sebuah pertemuan politik oleh elit lokal tersebut. Budaya lonto leok yang telah dimodernisasi

oleh politik kini memiliki suatu pandangan baru, yakni sebagai suatu arena kontestasi elit lokal berbasis golongan politik untuk menarik simpati masyarakat.

Masyarakat manggarai memiliki suatu pandangan yang besar terhadap elit lokal di mana elit lokal merupakan orang yang paling dipercaya dan dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah. Setiap permasalahan yang ada di kampung selalu diselesaikan melalui lonto leok berdasarkan asas musyawarah untuk dengan menjadikan para elit lokal sebagai penengah, dan segala keputusan yang dikeluarkan oleh elit lokal dianggap paling tepat dan benar.

Kebudayaan lonto leok Manggarai merupakan suatu kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang orang Manggarai. Secara harafiah, lonto leok diartikan sebagai duduk melingkar dalam arti duduk bersama untuk membicarakan segala persoalan dan masalah yang terjadi di kampung (beo).

Konsep kebudayaan lonto leok bertolak dari model rumah adat orang manggarai yang berbentuk kerucut (Mbaru Gendang). Dalam bidang politik, Lonto-Leok sudah menjadi kebiasaan masyarakat Manggarai sejak zaman kerajaan. Budaya Lonto-Leok dijadikan sebagai media para raja, dalu atau camat dan pemimpin desa untuk mengkomunikasikan kebijakan, program kerja dan kebijakan tertentu pada saat kepemimpinannya.

Sampai saat ini, kebudayaan lonto leok masih digunakan oleh aktor-aktor politik berbasis elit lokal dalam setiap perhelatan pemilihan umum kepala daerah di Manggarai. Model lonto leok leok dalam politik dapat dijelaskan dengan sebuah artikel yang berjudul “Gendang Rembong, Torok Golo, Niang Sita dan Paket ASET” (Alfred Tuname, 2018). Dalam artikel ini dijelaskan mengenai proses lonto leok yang dilakukan oleh paket pemenang Agas Andreas, SH., M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus pada perhelatan pemilihan kepala daerah kabupaten Manggarai Timur 2018.

“Politik selalu tidak bisa lepas dari anasir-anasir budaya lokal. Actus politik perlu mendapatkan tuntutan nilai dan norma budaya setempat. Keadaban politik justru tercermin dari pelaku politik (politisi) yang menghargai budaya sehingga demokrasi politik bisa merayakan ke-lokal-annya”.

Bagi orang Manggarai, rumah adat merupakan simbol kekuasaan adat. Sebagai simbol kekuasaan adat, rumah adat dimiliki oleh segenap warga komunitas adatnya sendiri dan dipimpin oleh tetua adat. Hegemoni tetua adat berpengaruh pada ritus dan habitus hidup masyarakat adatnya. Talcott Parson dalam *The Structural of Social Action* (1983), menyebutkan bahwa kohesi sosial dapat tercipta dengan adanya

sistem sosial yang utuh melalui adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Dari sinilah hegemoni adat dan budaya orang Manggarai terus terjaga yang tercermin dalam ungkapan “gendang one lingko peang”.

Atas kesadaran itulah, pasangan calon Agas Andreas, SH., M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus atau Paket ASET memasuki pilkada Manggarai Timur tahun 2018 dengan terus melakukan cultural approachment dalam mengukuhkan komitmen politik. Paket ASET memasuki roh budaya sekaligus menjadikannya sebagai sendi berpolitik. Nilai, pesan moral dan komitmen budaya pun menjadi sandi-sandi politik Paket ASET dalam pilkada Manggarai Timur tahun 2018. Hal itu dilakukan dengan mengikuti ritual selek atau pengukuhan pasangan calon di rumah-rumah adat orang Manggarai.

Mulanya, pada tanggal 19 Februari 2017 di gendang Rembong, Kecamatan Kota Komba. Saat itu, para tetua dan masyarakat adat Rembong termasuk hadir pat wa'u Mokel (Mukun, Ngusu, Deru, Manus) bersatu mengukuhkan secara adat Paket ASET sebagai calon bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018. Pada tanggal 5 Agustus 2017, Paket ASET di-selek oleh pat wa'u mokel di Gendang Mokel, Kecamatan Kota Komba. Saat itu, pat wa'u Mokel bersehati dalam ritual adat mendorong dan mengukuhkan Paket ASET sebagai calon bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018. Masyarakat Adat Torok Golo, Kecamatan Sita juga melakukan selek untuk Paket ASET pada tanggal 9 Maret 2018. Saat itu para tetua golo memberi restu adat kepada Paket ASET dalam pilkada Manggarai Timur tahun 2018. Selanjutnya pada tanggal 19 April 2018, para tetua adat Niang Sita dan tujuh panga-nya melakukan ritual selek sebagai tanda pemberian restu adat kepada Paket ASET pada pilkada Manggarai Timur tahun 2018.

Di balik semua ritual selek adat tersebut, ada warisan kepercayaan animistik bahwa leluhur juga hadir dan terlibat meneguhkan ritual tersebut. Atas dimensi sakral dan mistik tersebut, ritual selek pun dimengerti sebagai sumpah adat. Ungkapan metaforsis dalam kapok, sanda, danding, dan mbata yang dirayakan sebelum ritual selek selalu bermakna pesan yang luhur. Strategi kemenangan Paket ASET tampak selalu dirayakan dengan mengedepankan aspek moral, nilai, dan estetika. Hal itu tercermin dari cara kerja dan orasi-orasi kampanye politik.

Konten orasi kampanye pun berisi pendidikan politik dan ajakan untuk menggunakan hak politik secara baik. Terdapat kesukarelaan politik dari para tetua adat untuk mengukuhkan dan memberikan petuah adat kepada Paket ASET. Hasil riset KPU Manggarai Timur pada tahun 2015 menjelaskan bahwa tua adat adalah

orang terdepan yang menggerakkan masyarakat untuk merajut simpul-simpul perdamaian dalam pemilu. Pada konteks demokrasi politik, Paket ASET tentu mengharapkan adanya bandwagon effect dari semua proses budaya yang sudah dilakukan. Bahwa dengan posisi hegemonik para tetua adat,ase-kae pang olo ngaung musi komunitas adat dapat mengikuti teladan politik para tetua adat serta lebih dekat dekat Paket ASET.

Perhelatan Pemilu pada tahun 2020 di Manggarai mencerminkan sebuah manifestasi nyata dari adanya kebudayaan lonto leok yang ditunggangi oleh elit politik untuk menarik simpati dan suara dari masyarakat.

Pada pemilu pada Manggarai 2020, tim pemenangan Heri Nabit-Heri Ngabut (H2N) membentuk sebuah tim relawan yang terdiri gabungan anak muda yang tersebar di 12 kecamatan Kabupaten Manggarai. Tim ini diberi nama Laskar 88. Selain itu, dari kalangan ibu-ibu dan perempuan juga dibentuk sebuah tim relawan yang diberi nama Weta De Heri-Heri (WHH). Kedua tim relawan ini mempunyai misi untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon H2N.

Tim relawan laskar 88 biasanya mendampingi kedua pasangan calon untuk turun langsung ke kampung-kampung (beo) supaya mendekatkan diri dengan warga kampung. Mereka mengadakan sebuah pertemuan adat (lonto leok) di rumah adat (mbaru gendang) untuk membahas visi dan misi serta program-program kerja yang kedua pasangan calon akan jalankan jika kelak terpilih dalam pemilihan..

Sementara itu, relawan Weta De Heri-Heri mengadakan lonto leok kecil-kecilan di tingkat RT. Mereka mengumpulkan ibu-ibu dan kaum perempuan untuk menjabarkan visi dan misi dari pasangan calon Heri-Heri yang di mana salah satu visi dan misi tersebut bisa berpihak dan menguntungkan kaum perempuan.

Dari data yang didapatkan berdasarkan perhitungan dua Lembaga survey, pemilu pada Manggarai tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan calon Heribertus Nabit dan Heribertus Ngabut. Tim survey pertama menjabarkan hasil perhitungan suara dengan suara yang diraih oleh pasangan calon Deno-Madur sebesar 38,7% sedangkan pasangan calon Hery-Heri memperoleh suara sebesar 61,3%. Perhitungan ini menggunakan indeks margin of error sebesar 1%. Lembaga survey kedua menjabarkan hasil dengan perolehan suara dari pasangan calon Deno-Madur sebesar 37% sedangkan pasangan calon Hery-Heri memperoleh suara sebesar 63%. Perhitungan kedua ini menggunakan indeks margin of error sebesar 3%. Untuk hasil perhitungan suara pada kecamatan Langke Rembong yang terdiri dari desa atau

Bangka Nekang dan desa-desa lainnya yaitu; Hery-Hery sebesar 20.710 suara dan Deno-Madur sebesar 14.191 suara.

Sementara hasil perhitungan resmi KPU Kabupaten Manggarai menjabarkan pasangan calon Deno-Madur memperoleh suara sebesar 39,3% dengan total suara 67.285 sedangkan pasangan calon Hery-Heri memperoleh suara sebesar 60,7% dengan total suara 103.738. Dengan perhitungan KPU ini, secara resmi menetapkan pasangan calon Hery-Heri sebagai pemenang pilkada Kabupaten Manggarai 2020.

Momentum Pilkada di Manggarai merupakan ajang yang paling penting bagi para elit lokal untuk memainkan perannya dan memberi pengaruh kepada masyarakat. Seringkali berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, para elit lokal ditunggangi oleh aktor-aktor politik untuk menarik simpati masyarakat dalam perhelatan pemilihan kepala daerah di Manggarai. Para calon legislatif, calon Bupati, calon DPR, dan DPRD selalu menggunakan lonto leok sebagai sarana untuk menarik suara masyarakat di mana mereka meminta bantuan dari para elit lokal untuk mengadakan suatu pertemuan adat (lonto leok). Biasanya sebelum pemilihan berlangsung, mereka turun ke desa-desa untuk menyampaikan visi dan misi mereka apabila kelak terpilih dalam suatu pemilihan umum.

Suatu catatan penting bahwa eksistensi dari para elit lokal tidak dapat terpisahkan dengan budaya lonto leok itu sendiri. Elit lokal dengan sendirinya memiliki suatu tempat terhormat dalam lapisan masyarakat manggarai dikarenakan elit lokal dipandang sebagai figur yang kuat yang selalu tampil dalam prosesi lonto leok di mana mereka dapat memberikan pengaruh terhadap psikologi masyarakat dalam menentukan hak pilihnya. Hal ini dipandang sebagai suatu terobosan baru bagi para calon legislatif untuk memenangkan pemilihan umum berkat bantuan para elit lokal yang mereka tunggangi.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian dengan judul ;

Lonto Leok : Sebuah Arena Kontestasi Elit Lokal Dalam Pilkada Lokal Manggarai (Studi Kasus di Kampung adat desa Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

- Sejujukanakah budaya lonto leok digunakan oleh para elit lokal sebagai arena kontestasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah di Manggarai ?
- Bagaimana hegemoni atau dominasi elit lokal dalam budaya lonto leok sebagai sebuah arena kontestasi?

1.3 Batasan Masalah

Peneliti bermaksud agar penelitian ini memiliki titik fokus yang hanya tertuju pada suatu masalah agar penelitian ini tidak menimbulkan multitafsir dari berbagai pihak. Maka dari itu peneliti membataskan diri pada pengaruh dan keikutsertaan elit lokal dalam menjadikan budaya lonto leok sebagai media untuk kepentingan politik dalam pemilihan umum kepala daerah di Manggarai.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran dan keikutsertaan elit lokal dalam kontestasi pemilu pada di Manggarai
2. Untuk mengetahui eksistensi budaya lonto leok sebagai arena kontestasi pemilu pada di Manggarai
3. Untuk mengetahui hegemoni elit lokal dalam budaya lonto leok

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

Secara akademik penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti pada khususnya dan bagi mahasiswa pada umumnya mengenai pengaruh dan keikutsertaan elit lokal dalam menjadikan budaya lonto leok sebagai arena kontestasi politik dalam pilkada di Manggarai.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menjalankan kehidupan politik yang demokratis tanpa mengesampingkan nilai-nilai adat masyarakat Manggarai yang terkandung di dalam budaya lonto leok.